Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce
Volume. 5, Nomor. 3, September 2026
E-ISSN : 2962-0821; P-ISSN : 2964-5298; Hal. 1089-1102
DOI: https://doi.org/10.30640/digital.v5i3.7873
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital

Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng

I Made Anugrah Gunung Merta[1*], Ni Made Suci[2]
[1-3]Program Studi Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia
Email: anugrah.gunung@student.undiksha.ac.id[1], made.suci@undiksha.ac.id[2]

**Penulis Korespondensi: anugrah.gunung@student.undiksha.ac.id*

Abstract. *The implementation of regional autonomy requires local governments to manage finances effectively, efficiently, transparently, and accountably in order to improve the quality of public services and regional fiscal independence. This study aims to analyze the regional financial performance of the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Buleleng Regency during the 2020–2024 period through regional financial ratio analysis. The research employs a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from the Budget Realization Reports (LRA), Local Government Financial Reports (LKPD), and other supporting documents published by BKAD Buleleng Regency. The analysis utilizes effectiveness ratios, efficiency ratios, growth ratios, and regional financial independence ratios to describe the local government's capacity to optimally manage revenues and expenditures. Through this research, it is expected to obtain an overview of the financial performance condition of BKAD Buleleng Regency, thereby identifying aspects that still need improvement in regional financial management. The results of this study are expected to serve as evaluation material and recommendations for the local government in enhancing the effectiveness of APBD management, optimizing Regional Original Revenue (PAD), strengthening fiscal independence, and supporting the realization of transparent, accountable, and sustainable regional financial governance.*

Keywords: *Effectiveness Ratio; Efficiency Ratio; Growth Ratio; Regional Financial and Asset Agency; Regional Financial Performance Analysis; Regional Original Revenue.*

Abstrak. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng selama periode 2020–2024 melalui analisis rasio keuangan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh BKAD Kabupaten Buleleng. Analisis dilakukan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian keuangan daerah untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara optimal. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan BKAD Kabupaten Buleleng, sehingga dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu dtingkatkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, memperkuat kemandirian fiskal, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Analisis Kinerja Keuangan Daerah; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Rasio Efektivitas; Rasio Efisiensi; Rasio Pertumbuhan.

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sistem otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara mandiri, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang berkualitas. Menurut Fitri dan Kamela (2025), rasio keuangan adalah alat analisis yang

Naskah Masuk: 15 Juli 2026; Revisi: 15 Agustus 2026; Diterima: 13 September 2026; Terbit: 17 September 2026

digunakan untuk menilai kondisi keuangan daerah secara menyeluruh, mencakup aspek efisiensi, efektivitas, dan kemandirian. Rasio-rasio tersebut digunakan untuk mengevaluasi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, mengendalikan belanja, serta menilai ketergantungan terhadap dana perimbangan.

Kinerja pengelolaan keuangan merupakan indikator keberhasilan dalam menerapkan sistem otonomi (Tumija & Sinta, 2022). Analisa rasio keuangan terhadap laporan keuangan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan laporan keuangan sebagai sumber dari angka-angka yang akan digunakan sebagai perhitungan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, dan rasio derajat desentralisasi sebagai alat untuk mengukur kinerja di BKAD Kabupaten Buleleng.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai permasalahan. Suarnama (2022) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng memiliki rasio derajat desentralisasi dalam kategori kurang, rasio efektivitas kurang efektif, rasio efisiensi kurang efisien, dan rasio keserasian untuk belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal. Wulandari et al. (2023) juga menemukan bahwa derajat desentralisasi masih sangat rendah, rasio efisiensi masih berfluktuasi, rasio keserasian menunjukkan belanja operasi lebih besar daripada belanja modal, dan rasio pertumbuhan kurang baik.

Kabupaten Buleleng memiliki potensi fiskal yang cukup signifikan dari sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, maupun jasa. Namun, kinerja keuangan daerah masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek efisiensi belanja, ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat, serta kemampuan peningkatan PAD yang belum maksimal. Dalam konteks ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng memiliki peran yang sangat strategis dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi keuangan daerah.

Berdasarkan data laporan realisasi APBD Kabupaten Buleleng dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum sepenuhnya mencapai target dan PAD belum mampu menjadi sumber pembiayaan dominan. Tabel 1 menunjukkan realisasi PAD Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Permasalahan peningkatan PAD juga kembali menjadi salah satu fokus dalam rencana strategis BKAD Kabupaten Buleleng tahun 2023–2026.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya analisis kinerja keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Melalui analisis

rasio keuangan dapat diketahui apakah keuangan daerah dikelola secara sehat, produktif, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng".

2. KAJIAN TEORITIS

Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991) dalam Anugeraheni (2021), penelitian ini menggunakan theory stewardship, yang menyoroti bahwa manajer atau pihak yang diberi tanggung jawab memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak secara etis, efisien, dan bertanggung jawab dalam mengutamakan kepentingan pemilik atau pihak pemberi amanah. Stewardship theory didasarkan pada asumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk bekerja sama dan berkontribusi terhadap tujuan bersama, terutama jika diberikan lingkungan yang mendukung. Teori ini mengutamakan pentingnya perilaku yang kooperatif dan orientasi terhadap kepentingan organisasi atau kelompok dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Dalam penerapan teori ini, manajer dianggap sebagai steward (pengelola) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai hasil optimal bagi pemangku kepentingan. Stewardship theory juga menekankan pentingnya trust (kepercayaan) dan hubungan yang saling mendukung antara pihak-pihak dalam organisasi.

Analisis Kinerja Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah

Analisis kinerja keuangan adalah metode untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan dengan cara membandingkan berbagai pos dalam laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, untuk menghasilkan rasio-rasio yang mencerminkan kinerja dan stabilitas perusahaan (Harahap, 2017). Analisis ini bertujuan untuk membantu manajemen, investor, kreditor, dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih rasional dan berbasis data. Menurut Kasmir (2016), analisis kinerja keuangan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan perusahaan dan digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, serta efisiensi pengelolaan aset, utang, modal, dan laba. Analisis Kinerja Keuangan adalah teknik analisis penggabungan antara satu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan, yang dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana dalam periode atau kurun waktu tertentu.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia berlaku dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1999 (direvisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim dan Abdullah, 2006). Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (guidance) dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas mengukur sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan atau target pendapatan yang telah ditetapkan. Dalam konteks keuangan daerah, rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan target yang direncanakan. Hubungannya dengan Kinerja Keuangan, semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja keuangan, karena menunjukkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan pendapatan yang direncanakan, efektivitas yang tinggi mencerminkan pengelolaan sumber daya dan strategi fiskal yang baik dan dalam konteks perusahaan, efektivitas menunjukkan kemampuan menghasilkan output (penjualan, pendapatan) sesuai rencana, yang berdampak langsung pada profitabilitas dan stabilitas keuangan.

Rasio Efisiensi

Rasio ini rasio efisiensi mengukur sejauh mana organisasi mampu menggunakan sumber daya (input) seperti biaya, waktu, dan tenaga untuk menghasilkan output (pendapatan atau layanan) secara optimal. Hubungannya dengan kinerja keuangan, efisiensi berperan besar dalam meningkatkan profitabilitas, dalam pemerintahan, efisiensi menunjukkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan belanja untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal, efisiensi yang baik berarti entitas menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya minimal, yang memperkuat keefektivitasan, keefisiensian, dan keseimbangan anggaran. Terkait rumusnya sebagai berikut, REKD = Realisasi Belanja Daerah/Anggaran PAD x 100%.

Rasio Pertumbuhan

Rasio aktivitas mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Bagi Badan Pengelolaan/Perusahaan, seperti BKAD, efisiensi

dalam mengelola persediaan, piutang, dan aset tetap menjadi sangat penting. Adapun rumusnya yakni, Nilai PAD(sekarang) – Nilai PAD(sebelum)/Nilai PAD (sebelum) x 100%. Hubungannya dengan Kinerja Keuangan, rasio pertumbuhan mencerminkan trend kinerja keuangan jangka panjang, bukan hanya hasil sesaat, pertumbuhan pendapatan dan laba menunjukkan daya saing, inovasi, dan produktivitas yang meningkat, dalam konteks daerah, pertumbuhan PAD atau belanja pembangunan mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah indikator kuantitatif dari seberapa baik perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan, menjaga efisiensi, dan mencapai tujuan operasional. Kinerja ini umumnya diukur dengan parameter efektivitas, efisiensi operasional, struktur modal, serta pertumbuhan pendapatan dan laba (Munawir, 2010). Kinerja keuangan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Bagi BKAD, kinerja keuangan yang baik berarti mampu menghasilkan laba secara berkelanjutan, menjaga efektivitas, mengelola utang dengan bijak, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Kinerja keuangan suatu pemerintahan daerah dapat diperoleh dari informasi yang disajikan melalui suatu laporan keuangan pada satu periode.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan objek laporan keuangan BKAD Kabupaten Buleleng periode 2020–2024. Penelitian dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng dengan unit analisis berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020–2024. Populasi dan sampel penelitian berupa laporan keuangan daerah yang tersedia selama periode penelitian. Instrumen penelitian menggunakan pedoman dokumentasi dan wawancara untuk memperoleh data yang relevan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi laporan keuangan, serta wawancara dengan pegawai BKAD sebagai informan. Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif deskriptif melalui perhitungan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan berdasarkan data LRA tahun 2020–2024. Hasil perhitungan rasio kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan serta mengevaluasi kinerja keuangan daerah Kabupaten Buleleng.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas

Analisis rasio efektivitas BKAD Kabupaten Buleleng tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan pada tabel berikut ini,

$$Rasio\ efektivitas = \frac{PAD\ riil\ x\ 100\%}{PAD\ Target}$$

Tabel 1. Rasio Efektivitas Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	(%)	Kriteria
2020	Rp 156.529.131.050,71	Rp 144.469.495.716,49	92,29%	Tidak Efektif
2021	Rp 182.930.921.627,50	Rp 167.352.095.771,65	91,48%	Tidak Efektif
2022	Rp 218.860.370.727,00	Rp 194.766.532.926,65	88,99%	Tidak Efektif
2023	Rp 231.951.852.711	Rp 252.250.682.193,41	108,75%	Tidak Efektif
2024	Rp 323.315.713.408,00	Rp 292.938.467.368,89	90,60%	Tidak Efektif

Berdasarkan diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan di BKAD Kabupaten Buleleng dari tahun 2020 menunjukkan hasil kriteria mencapai 92,29% yang jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai hasil presentase sebesar 91,48% hal ini justru mencerminkan adanya penurunan hingga sampai tahun 2022 yang hanya mencapai hasil kriteria sebesar 88,99%, dan jika dilihat pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2023 justru mengalami peningkatan presentase dengan hasil kriteria senilai 108,75%, disisi lain pada tahun 2024 justru mengalami penurunan senilai 90,60%.

Rasio Efisiensi

Analisis rasio efisiensi BKAD Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

$$Rasio\ Efisiensi\ \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} x100\%$$

Tabel 2. Rasio Efisiensi Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	(%)	Kriteria
2020	Rp 144.469.495.716,49	Rp 129.000.409.072,76	89,29%	Efisien
2021	Rp 1.858.578.368.036,40	Rp 277.013.181.990,00	14,90%	Efisien
2022	Rp 1.840.290.335.617,64	Rp 287.781.398.643,00	15,64%	Efisien
2023	Rp 1.975.427.949.309,09	Rp 301.633.675.354,00	15,27%	Efisien
2024	Rp 2.283.029.463.590,89	Rp 325.818.685.161,00	14,27%	Efisien

Rasio efisiensi di BKAD Kabupaten Buleleng sebesar 89,29% pada tahun 2020, pada tahun 2021 berikutnya justru malah mengalami penurunan yang cukup tajam yakni memperoleh hasil persentase sebesar 14,90%, disisi lain jika dilihat pada tahun 2022 mencerminkan adanya peningkatan menjadi 15,64% dan pada tahun 2023 justru mengalami penurunan kembali menjadi 15,25%. Informasi ini terwakili dalam tabel di atas. Pada tahun 2024 justru menurun kembali dengan memperoleh hasil persentase 14,27%.

Rasio Pertumbuhan

Analisis rasio pertumbuhan BKAD Kabupaten Buleleng tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan pada tabel dibawah ini.

$$Rasio\ Pertumbuhan = \frac{PAD\ Th_t - PAD\ Th_{t-1}}{PAD\ Th_{t-1}}$$

Keterangan:

PAD Th_t = Total PAD tahun yang dihitung

PAD Th_{t-1} = Total PAD tahun sebelumnya

Tabel 3. Rasio Pertumbuhan Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi	(%)
2019	Rp 184.703.324.230,58	-
2020	Rp 144.469.495.716,49	21,78%
2021	Rp 167.352.095.771,65	15,84%
2022	Rp 194.766.532.926,65	16,38%
2023	Rp 252.250.682.193,41	29,51%
2024	Rp 292.938.47.368,89	16,13%

Berdasarkan tabel di atas, BKAD Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 menunjukkan hasil persentase sebesar 21,78% dan ditahun berikutnya pada 2021-2023 mengalami peningkatan terus menerus, dengan hasil persentase senilai 15,84% di tahun 2021, 16,38% di tahun 2022, dan 29,51% di tahun 2023, disisi lain pada tahun berikutnya yakni 2024 mengalami penurunan dan memperoleh hasil persentase sebesar 16,13%.

Pembahasan Hasil Penelitian

Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan pada tabel rasio efektivitas, kinerja BKAD Kabupaten Buleleng selama periode 2020–2024 mengalami dinamika fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio efektivitas mengalami peningkatan hingga mencapai 92,29% yang dipengaruhi oleh penerimaan retribusi sebesar Rp 1.227.718.500,00 serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 19.823.539.604,20. Namun, angka tersebut mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2021 menjadi 91,48% akibat penurunan retribusi daerah menjadi Rp 963.020.400,00, serta pada tahun 2022 menjadi 88,99% yang dipengaruhi oleh kontribusi pengelolaan kekayaan daerah secara terpisah sebesar Rp 15.581.604.414,65 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 4.713.300.255,59. Kinerja efektivitas kemudian melonjak signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai 108,75%, ditopang secara dominan oleh perolehan pajak sebesar Rp 221.543.885.845,93 dan hasil pengelolaan kekayaan daerah secara terpisah sebesar Rp 24.631.695.198,13. Kendati demikian, rasio ini kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 90,60%, yang secara signifikan disebabkan oleh laju pertumbuhan target anggaran yang dipatok jauh lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan realisasinya di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka rata-rata rasio efektivitas BKAD Kabupaten Buleleng yakni 92,03% yang berarti pengelolaan keuangan masih tergolong "belum efektif." Walaupun dari segi keseluruhan tingkat efektivitas dikatakan belum efektif, namun yang menjadi kabar baik yakni di tahun 2023 BKAD Kabupaten Buleleng sudah mulai memunculkan hasil dari upayanya dalam meningkatkan PAD yang dapat dibuktikan dengan persentase tingkat rasio di atas 100%. Penyebab meningkat dan menurunnya PAD ini telah disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kabupaten Buleleng pada tahap wawancara yang dilakukan peneliti.

"Di tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi covid yang sangat berpengaruh pada pariwisata sehingga berdampak juga ke penerimaan PAD baik itu di anggaran dan realisasi. Di tahun 2021 sudah mengalami perubahan fase menjadi endemi. Tahun 2022 kembali lagi stabil perekonomiannya."

Selain yang telah disebutkan, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan juga menyampaikan bahwa terdapat kendala dalam ketercapaian terhadap target-target yang hendak dicapai selama 2020-2024 ini antara lain:

Pada tahun 2023, di tengah transisi kondisi pascapandemi COVID-19, kegiatan ekonomi diperkirakan berjalan lebih baik dan kinerja berbagai lapangan usaha mulai terakselerasi; namun, beberapa sektor tumpuan penerimaan daerah seperti Pajak Hiburan, Pajak Parkir, serta retribusi daerah belum mampu beroperasi secara maksimal akibat tekanan inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat—khususnya kelompok berpenghasilan di bawah rata-rata—sehingga masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan primer dibandingkan sektor tersier seperti pariwisata dan jasa usaha. Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah serta rasio yang terbatas terhadap APBD Kabupaten Buleleng membatasi kemampuan alokasi dana pemda, sehingga sebagian besar pengeluaran terpaksa ditopang oleh dana surplus—termasuk Dana Penyediaan Umum dari Pemerintah Pusat—guna menutupi tingginya penyerapan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri yang menyerap porsi besar Dana Alokasi Umum (DAU). Guna menstabilkan penerimaan daerah dan mencegah gangguan terhadap rencana pengeluaran, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis, meliputi pengoptimalan pendataan dan pemetaan potensi subjek serta objek pajak dan retribusi; digitalisasi pengelolaan dan pemungutan pajak untuk meningkatkan efisiensi; pelaksanaan kegiatan promosi, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan peningkatan pelayanan publik; serta perancangan strategi baru dan edukasi publik guna

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesadaran dan tanggung jawab perpajakan daerah.

Rasio Efisiensi

Berdasarkan data pada tabel, perkembangan rasio efisiensi di BKAD Kabupaten Buleleng selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, persentase rasio efisiensi meningkat hingga mencapai 89,29% akibat dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan pendapatan daerah menjadi Rp 144.469.495.716,49 sekaligus meningkatkan belanja daerah menjadi Rp 129.000.409.072,76. Memasuki tahun 2021, rasio ini mengalami penurunan tajam menjadi 14,90% seiring dengan transisi pandemi menuju endemi dan pelonggaran mobilitas masyarakat, yang memicu lonjakan pendapatan daerah secara signifikan meskipun belanja daerah turut naik menjadi Rp 277.013.181.990,00. Rasio efisiensi kemudian mengalami kenaikan tipis pada tahun 2022 menjadi 15,64% yang disebabkan oleh penurunan total pendapatan daerah menjadi Rp 1.840.290.335.617,64 di tengah peningkatan belanja daerah menjadi Rp 287.781.398.643,00. Namun, pada tahun 2023 rasio ini kembali turun menjadi 15,27% akibat peningkatan realisasi pendapatan daerah menjadi Rp 1.975.427.949.309,06 yang diimbangi peningkatan belanja daerah menjadi Rp 301.633.675.354,00. Tren penurunan berlanjut hingga tahun 2024 mencapai 14,27%, yang disebabkan oleh pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang jauh lebih besar dibandingkan persentase pertumbuhan realisasi belanjanya.

Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata rasio efisiensi BKAD Kabupaten Buleleng yakni 31,67% yang berarti pengelolaan keuanagan selama ini "sudah efisien". Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini dalam mengelola antara pendapatan dan belanja daerah BKAD sudah selalu mengupayakan pengefisensian biaya di setiap kegiatannya atau bisa disebutkan bahwa anggaran yang dikeluarkan telah cocok dengan manfaat yang diharapkan sehingga tidak terjadi pengelolaan dana yang tidak optimal. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan juga memaparkan pada saat wawancara bahwa:

"Kita selalu berupaya dik agar program yang kita rencanakan tetap tercapai tapi tidak mengakibatkan pembengkakan biaya. Contoh kecil efisien, selama ini kita setiap rapat ngundang SKPD dan kita berikan makan minum itu ada realisasi keuangan untuk belanja makan minum. Tapi kita gunakan zoom, secara fisik sudah dia tercapai realisasinya karena kita sudah tetap melaksanakan itu tetapi medianya melalui zoom dengan tidak menggunakan belanja makan minum sehingga kita lebih menghemat. Efisiensi yang kami lakukan itu dari segi pembiayaan dengan tidak mengurangi kegiatan yang sudah direncanakan."

Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan data pada tabel, hasil analisis perhitungan rasio pertumbuhan di BKAD Kabupaten Buleleng selama periode 2020–2024 menunjukkan tren dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio pertumbuhan mengalami penurunan drastis menjadi 21,78% akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengikis perolehan PAD sebesar Rp 40.233.828.514,09 hingga menyisakan Rp 144.469.495.716,49. Kendati demikian, sepanjang periode tahun 2021 hingga 2023, perolehan PAD berhasil mencatatkan kenaikan secara konsisten; hal ini tecermin dari pertumbuhan rasio tahun 2021 sebesar 15,84% dengan PAD Rp 167.352.095.771,65, meningkat pada tahun 2022 menjadi 16,38% dengan PAD Rp 194.766.532.926,65, dan melonjak pada tahun 2023 mencapai 29,51% dengan raihan PAD sebesar Rp 252.250.682.193,41. Memasuki tahun 2024, rasio pertumbuhan kembali terkoreksi ke angka 16,13%, yang mana penurunan ini dipicu oleh melambatnya laju pertumbuhan nominal realisasi belanja dan pendapatan jika dibandingkan dengan lonjakan pertumbuhan yang terakumulasi pada tahun 2023.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh, rasio pertumbuhan PAD BKAD Kabupaten Buleleng memiliki rata-rata sebesar 15,85% yang digolongkan dalam kriteria "tidak baik", artinya pengelolaan keuangan dalam hal menjaga kestabilan pertumbuhan PAD sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Melalui hal ini tentunya BKAD Kabupaten Buleleng memiliki tugas yang sangat penting untuk setiap tahunnya menaruh perhatian yang khusus terhadap perkambangan PADnya sendiri dan selalu mengupayakan agar mengalami peningkatan. Ditambah lagi berdasarkan hasil reviu renstra bahwa tingkat PAD masih digolongkan rendah, sehingga hal ini memicu atau mendorong BKAD untuk selalu berupaya merealisasikan program-program yang dicanangkan agar terealisasi dengan maksimal sehingga tingkat PAD dan pengelolaan keuangan di BKAD akan terus mengalami peningkatan.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada saat wawancara memaparkan bahwa:

"Pada tahun 2021 itu mulai yang namanya pendigitalisasian jadi wajib pajak sudah dapat melakukan kewajibannya secara online tanpa perlu datang ke kantor. Ini juga memudahkan para pemilik hotel, restaurant, penginapan untuk membayar pajak sehingga tidak lagi ada kendala jarak atau takut berkerumun pasca covid-19. Akan tetapi karena ini baru tahun pertama, kami terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan selama setahun. Di tahun 2022 barulah sistem pendigitalisasian benar-benar berjalan efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja PAD di tahun berikutnya."

Implikasi

Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahhwa analisa kinerja keuangan pemerintah daerah sangat bermanfaat bagi instansi pemerintah tidak terkecuali bagi BKAD Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan apabila nantinya dapat diterapkan. Selain itu, analisis rasio dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan pemerintah, serta dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk menentukan tindakan perbaikan apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap keadaan keuangannya di masa depan.

Praktis

a) Bagi BKAD

Melalui hasil penelitian ini dapat diperoleh data mengenai kondisi keuangan ditinjau dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah sehingga efektif, efisien atau tidaknya serta perkembangan penggunaan anggaran dapat tercermin dari hasil perhitungan sesuai rumus yang telah tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rasio keuangan BKAD Kabupaten Buleleng secara umum termasuk dalam kategori belum optimal dikarenakan tingkat rata-rata seluruh rasio bersifat kurang baik dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dengan hal ini, analisa kinerja keuangan menggunakan rasio dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi untuk memperbaiki situasi dan kondisi keuangan sebelumnya melalui sasaran dan target yang telah ditetapkan pada Renstra. Melalui analisa rasio dapat memudahkan BKAD Kabupaten Buleleng dalam mengklasifikasikan penyebab terjadinya kondisi tersebut karena dapat ditinjau dari potensinya seperti PAD, belanja modal, belanja operasi, dan lainnya. Selain itu, analisis rasio dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan pemerintah, serta dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk menentukan tindakan perbaikan apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap keadaan keuangannya di masa depan. keputusan.

b) Civitas Akademika

Penelitian ini menunjang mahasiswa dalam pencairan referensi dalam pembuatan tugas kuliah, tugas akhir atau skripsi, dan juga bisa dijadikan bahan bacaan di perpustakaan Undiksha.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang cukup baik berdasarkan analisis rasio efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Rasio efektivitas

memperoleh rata-rata sebesar 92,03% dan termasuk kategori efektif, meskipun realisasi PAD mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Rasio efisiensi memperoleh rata-rata sebesar 31,67% dan termasuk kategori sangat efisien, yang menunjukkan kemampuan BKAD dalam mengelola anggaran dengan biaya yang relatif minimal melalui digitalisasi dan optimalisasi program. Sementara itu, rasio pertumbuhan PAD memiliki rata-rata sebesar 15,85% dan menunjukkan pertumbuhan positif, namun masih belum maksimal karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer serta belum optimalnya penggalian potensi PAD. Dengan demikian, BKAD Kabupaten Buleleng perlu terus meningkatkan efektivitas dan pertumbuhan PAD, meskipun kinerja efisiensi pengelolaan keuangan telah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Saran

BKAD Kabupaten Buleleng disarankan untuk meningkatkan PAD melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, memperkuat digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, serta menerapkan analisis rasio keuangan secara berkala sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga perlu menyusun kebijakan fiskal berbasis data serta mendorong pengembangan sektor unggulan, seperti pariwisata, pertanian, UMKM, dan ekonomi kreatif, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan rasio keuangan lainnya, melakukan perbandingan dengan daerah lain, serta mengkaji hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan indikator pembangunan, seperti IPM, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, J., & Zakiyah, I. (2022). Analisa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kupang periode tahun 2017–2021. *Jurnal Manajemen, 6*(2), 602–619.

Akib, M., Nurdin, E., Fadliah, R., & Fitriyani. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAKUHO), 9*(1).

Amanda, R., Arief, K., & Ishak, J. F. (2021). Analisa laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal, 2*(1), 52–62. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i1.3389

Darmawan, A. (2017). *Manajemen keuangan pemerintah daerah: Teori dan praktik*. Pustaka Pelajar.

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review, 22*(1), 20–47.

Doce, Y. A., & Djaha, Z. A. (2022). Analisa kinerja komponen pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata (Studi kasus pada PT. Pelindo III Kupang). *Jurnal Akuntansi, 9*(1), 29–38.

Fitriana, A. (2024). *Buku ajar analisis laporan keuangan*. CV Malik Riski Amanah. https://repo.unperba.ac.id/dosen/download/384

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2007). *Manajemen keuangan daerah* (Ed. 2). UPP STIM YKPN.

Harahap, S. S. (2017). *Analisis kritis atas laporan keuangan*. Raja Grafindo Persada.

Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Pengaruh rasio keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1*(5), 1192–1201. https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.216

Kasmir. (2019). *Analisa laporan keuangan* (Ed. 1). PT Raja Grafindo Persada.

Makaminang, N. E., Ilat, V., & Wokas, H. R. N. (2022). Evaluasi efektivitas dan efisiensi dalam laporan realisasi anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 6*(1), 325–334.

Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Ed. 4). UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2020). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.

Maulia, S. (2022). *Analisa rasio keuangan daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan APBD tahun 2020 masa pandemi Covid-19 di Kota Langsa Provinsi Aceh*. https://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8788

Mardlotillah, U., Putri, A. M., & Suriyanti, L. H. (2025). Analisis *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintahan desa Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar periode 2021–2023. *Akuntansi dan Manajemen (Akuntansi Kompetif), 8*(3).

Munawir, S. (2012). *Analisis informasi keuangan*. Liberty.

Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisa kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Inovasi, 17*(1), 184–197. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067

Nasir, M. S. (2019). Analisa sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2*(1), 30–45. https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45

Pemkab Buleleng. (2020). *Reviu rencana strategis (Renstra) tahun 2017–2022*. https://bulelengkab.go.id/informasi/download/75-reviu-rencana-strategis-renstra-tahun-2017-2022-badan-pengelolaan-keuangan-dan-pendapatan-80daerah-kabupaten-buleleng.pdf

Saragih, J., & Siregar, H. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*.

Suarnama, A. C. (2022). *Analisa rasio pada laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisa rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 9*(2), 61–78. https://doi.org/10.33701/jekp.v9i2.2806

Wulandari, N., dkk. (2023). *Analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Mataram*.

Yohan, Y. I., & Taman, A. (2019). Analisa rasio keuangan sebelum dan sesudah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 pada Puskesmas Tegalrejo Yogyakarta periode 2016–2017. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 8*(1), 94–108. https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24502